

## Financial Independence Ratio Analysis Of The Regional Government Apbd Of Seluma Regency

### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Apbd Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma

Rengga Martika <sup>1)</sup>; Neri Susanti <sup>2)</sup>; Dewi Harwini <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [martikarengga5@gmail.com](mailto:martikarengga5@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [21 November 2025]

Revised [31 December 2025]

Accepted [05 January 2026]

#### KEYWORDS

Financial Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat. Melalui analisis rasio kemandirian keuangan APBD, dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Seluma mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendapatan lain.. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kuantitatif, dengan melihat rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi dan rasio efektivitas APBD PEMDA Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020-2024. Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2024 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 71,99% terbilang kurang efektif. Sedangkan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan hasil rata-rata sebesar 97,99% terbilang efektif. Hasil perhitungan rasio efisiensi dari rata-rata perhitungan Total Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 93,40% terbilang kurang efisien. Sedangkan rata-rata pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 96,61 terbilang kurang efisien. Rasio efektivitas hasil rata-rata perhitungan pencapaian sasaran dan tujuan PAD tahun 2020 dan 2024 sebesar 62,45% terbilang kurang efektif. Sedangkan hasil perhitungan total belanja daerah menunjukkan rata-rata sebesar 96,61% terbilang efektif.

#### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the Financial Independence Ratio, Efficiency Ratio, and Effectiveness Ratio of the Seluma Regency Regional Government's Regional Budget (APBD). The method used in this study is quantitative, by looking at the financial independence ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio of the Seluma Regency Government's Regional Budget (APBD) for the 2020-2024 period. The results show that the financial independence ratio related to Local Own-Source Revenue (PAD) for the years 2020-2024 has an average value of 71.99%, which is considered less effective. Meanwhile, transfers from the central government show an average value of 97.99%, which is considered effective. The results of the efficiency ratio calculation for the average total regional expenditure of the Seluma Regency Government from 2020 to 2024 amount to 93.40%, which is considered less efficient. Likewise, the average regional revenue of the Seluma Regency Government during the same period is 96.61%, also categorized as less efficient. Furthermore, the effectiveness ratio, based on the average calculation of the achievement of PAD goals and objectives from 2020 to 2024, is 62.45%, which is considered less effective. In contrast, the calculation of total regional expenditure shows an average of 96.61%, which is categorized as effective.

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan. Salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi adalah rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah yang bersumber dari pusat.

Dalam konteks ini, rasio kemandirian keuangan daerah menjadi alat ukur yang krusial. Rasio ini menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan sumber pendapatan sendiri, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kuncoro (2018:12) menekankan pentingnya rasio kemandirian keuangan sebagai indikator efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi pula rasio kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kabupaten Seluma, dengan kemandirian fiskalnya yang masih rendah, membutuhkan analisis yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerahnya. Menurut Sihombing (2015:15) menambahkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah diantaranya adalah Struktur Ekonomi Daerah, Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah, dan Tingkat Ketergantungan terhadap Transfer dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, upaya-upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih terarah, seperti melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar, seperti pertanian, pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Seluma adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana transfer ini lebih besar dibandingkan dengan kontribusi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, yang menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan yang tinggi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Seluma masih belum mampu memaksimalkan sumber daya lokal untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional daerah. Hal ini menyebabkan kurangnya investasi pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap ekonomi daerah, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma perlu merancang kebijakan yang lebih inovatif dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis lainnya. Selain itu, keseimbangan antara belanja rutin dan belanja produktif juga harus diperhatikan, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dalam jangka panjang.

Dari fenomena yang ada, maka pemerintah daerah Kabupaten Seluma harus mengukur rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan berbagai rasio yang relevan, seperti Rasio Kemandirian Keuangan, yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Abdul Halim (2012:97) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya **Rasio Efisiensi**, yang berfungsi untuk mengukur seberapa efisien daerah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sartika (2019:98) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dan yang terakhir adalah **Rasio Efektivitas** yang berfungsi untuk mengukur seberapa efektif daerah dalam mencapai sasaran pembangunan dengan menggunakan anggaran yang ada. Faud (2016:90) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## LANDASAN TEORI

### Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara dari setiap urusan, kegiatan maupun program pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa **APBD** adalah **rencana keuangan tahunan pemerintah daerah** yang disusun berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD merupakan instrumen penting untuk mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

### Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Haryanto, (2017:28) keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban yang dinilai dari segi uang berupa barang yang bisa dijadikan kekayaan (pendapatan) daerah, selagi hal tersebut belum menjadi hak atau dikuasai negara atau daerah yang lebih tinggi kekuasaannya sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, membiayai belanja sampai meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Kemampuan keuangan daerah yang baik pasti tidak jauh dari peran kreativitas pemerintah daerah untuk membuat daerahnya maju dan mandiri dari segi finansial. Semakin baik strategi yang diambil semakin tinggi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya masing-masing namun tetap sesuai dengan peraturan kebijakan yang berlaku.

## Pengertian Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan dan operasional pemerintahannya dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kuncoro (2018:12) menekankan pentingnya rasio kemandirian keuangan sebagai indikator efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah, dan semakin besar rasio ini, semakin besar kemandirian daerah dalam mengelola anggaran pembangunan.

Siombing (2015:22) mengartikan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Rasio ini mencerminkan kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan dari sumber lokal tanpa harus bergantung pada transfer dana dari pemerintah. Sedangkan menurut Widodo (2019:22) mendefinisikan **kemandirian keuangan daerah** sebagai kemampuan daerah untuk memobilisasi dan mengelola pendapatan yang berasal dari sumber daya lokal untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kemandirian ini diukur dari rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah, di mana semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan, maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut.

## Penerapan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Widodo (2019:19) menjelaskan bahwa penerapan rasio kemandirian keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan APBD. Dengan mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, penerapan rasio ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Daerah yang memiliki rasio kemandirian yang tinggi dapat merencanakan pembangunan lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Fauzi (2016:16) mengemukakan bahwa penerapan rasio kemandirian keuangan daerah sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Daerah dengan rasio yang tinggi dapat lebih bebas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tanpa harus bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dalam penerapannya, daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, dan sektor lainnya agar dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangan mereka.

## METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Selama Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020-2024.

**Tabel 1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2012:97)

**Tabel 2 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Efisiensi Keuangan Daerah
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim (2012:97)

**Tabel 3. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Efektivitas Keuangan Daerah
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2012:97)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma

Hasil penelitian ini, penulis mengambil 3 (tiga) rasio pengukuran kemampuan keuangan daerah APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020-2024. Adapun rasio yang diambil, menurut Halim (2012:97) yaitu rasio kemandirian keuangan, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas.

#### Rasio kemandirian keuangan

Rasio kemandirian keuangan adalah mengukur sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan PAD, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Rasio kemandirian keuangan dapat dihitung dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2012:97)

Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD): Merupakan total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lainnya yang sah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5, Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan	Realisasi	Persentase (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
2020	61,90	65,16	105,27	Sangat Efektif
2021	58,94	36,19	61,39	Kurang Efektif
2022	45,88	31,46	68,59	Kurang Efektif
2023	32,09	24,72	77,03	Kurang Efektif
2024	26,47	40,15	151,68	Sangat Efektif
<b>Total</b>	<b>163,47</b>	<b>197,68</b>	<b>359,96</b>	
		<b>Rata-rata</b>	<b>71,99</b>	Kurang Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020-2024, dapat dilihat dibawah ini:

## a. Rasio Kemandirian Keuangan - PAD

$$\text{Tahun 2020} = \frac{65,16}{61,90} \times 100\% = 105.27$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{36,19}{58,94} \times 100\% = 61.39$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{31,46}{45,88} \times 100\% = 68.59$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{24,72}{32,09} \times 100\% = 77.03$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{40,15}{26,47} \times 100\% = 151.68$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan PAD di atas, menunjukkan bahwa dari tahun 2020 dan 2024 sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan hasil yang kurang efektif. Hal ini terjadi fluktuasi atau tidak stabil. Artinya pengelolaan PAD belum konsisten, sehingga daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan pendapatan agar tidak bergantung pada kondisi tertentu, misalnya situasi ekonomi nasional atau transfer pusat. Sedangkan dilihat dari rata-rata kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dari tahun 2020-2024 sebesar 71,99% (kurang efektif).

Indikator Total Pendapatan Daerah: Ini mencakup seluruh pendapatan yang diterima oleh daerah, termasuk transfer dari pemerintah pusat (misalnya Dana Alokasi Umum atau DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber pendapatan lainnya yang bukan berasal dari PAD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6 Hasil Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	PTPP	Realisasi	Persentase (%)	Kemandirian Keuangan Pusat
2020	886,72	813,97	91.79	Efektif
2021	838,40	820,94	97.92	Efektif
2022	817,33	812,62	99.42	Efektif
2023	894,10	890,20	99.56	Efektif
2024	987,85	1.000,57	101.29	Sangat Efektif
<b>Total</b>	<b>4.424,40</b>	<b>4.338,30</b>	<b>489,98</b>	
		<b>Rata-Rata</b>	<b>97,99</b>	Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

## Rasio Efisiensi

**Tabel 7 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Efisiensi Keuangan Daerah
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim (2012:97)

Indikator Biaya operasional merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program, kegiatan atau operasional sehari-hari yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8 Hasil Perhitungan Total Belanja Daerah (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Total Belanja Daerah	Realisasi	Persentase (%)	Efisiensi Keuangan Daerah
2020	1.024,54	918,59	89.66	Cukup Efisien
2021	983,81	918,31	93.34	Kurang Efisien
2022	948,67	926,19	97.63	Kurang Efisien
2023	1.027,42	941,16	91.60	Kurang Efisien
2024	1.137,70	1.078,46	94.79	Kurang Efisien
<b>Total</b>	<b>4.424,40</b>	<b>4.338,30</b>	<b>467,02</b>	
		<b>Rata-rata</b>	<b>93,40</b>	Kurang Efisien

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di atas pada total belanja daerah tahun 2020 cukup efisien. Arti pemerintah daerah telah mengelola belanja daerah dengan cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat efisiensi optimal. Masih ada potensi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas penggunaan anggaran agar hasil pembangunan dan pelayanan publik lebih maksimal. Sedangkan perhitungan rasio efisiensi pada total belanja daerah tahun 2021 sampai 2024 (kurang efisien) Artinya pemerintah daerah belum mampu mengelola belanja operasional dengan baik. Pengeluaran daerah terlalu besar dibandingkan pendapatannya, sehingga efisiensi keuangan menurun. Ini menunjukkan perlunya pengendalian anggaran yang lebih ketat dan optimalisasi sumber pendapatan agar keuangan daerah menjadi lebih sehat dan berdaya saing. Sedangkan rata-rata hasil perhitungan total belanja daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 93,40% (kurang efisien).

Indikator Pendapatan daerah yang dihasilkan adalah total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, seperti PAD, pendapatan dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya, dapat dilihat tabel dibawah ini.

**Tabel 9 Hasil Perhitungan Pendapatan Daerah (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Daerah	Realiasi	Persentase (%)	Efisiensi Keuangan Daerah
2020	973,52	892,59	91.69	Kurang Efisien
2021	952,52	925,04	97.12	Kurang Efisien
2022	911,31	900,87	98.85	Kurang Efisien
2023	985,53	966,93	98.11	Kurang Efisien
2024	1.100,70	1.070,96	97.30	Kurang Efisien
<b>Total</b>	<b>5.122,14</b>	<b>4.782,71</b>	<b>483,07</b>	
		<b>Rata-rata</b>	<b>96,61</b>	Kurang Efisien

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

### Rasio Efektivitas

**Tabel 10 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Efektivitas Keuangan Daerah
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2012:97)

**Tabel 11 Hasil Perhitungan Pencapaian Sasaran dan Tujuan (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Pencapaian Sasaran dan Tujuan	Realisasi	Persentase (%)	Efektivitas Daerah	Keuangan
2020	61,90	65,16	105.27	Sangat Efektif	
2021	58,94	36,19	61.39	Kurang Efektif	
2022	45,88	31,46	68.59	Kurang Efektif	
2023	32,09	24,72	77.03	Kurang Efektif	
2024	26,47	40,15	151.68	Sangat Efektif	
<b>Total</b>	<b>225,28</b>	<b>197,68</b>	<b>312,28</b>		
		<b>Rata-rata</b>	<b>62,45</b>	Kurang Efektif	

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan rasio efektivitas di atas, hasil perhitungan pencapaian sasaran dan tujuan tahun 2020 dan 2024 sangat efektif. Artinya pemerintah daerah berhasil dalam merealisasikan bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Sedangkan rasio efektivitas hasil perhitungan pencapaian sasaran dan tujuan PAD pada tahun 2021 dan 2023 kurang efektif. Artinya pemerintah daerah tidak berhasil mencapai target PAD yang direncanakan, karena realisasi pendapatan lebih rendah dari target. Kondisi ini menggambarkan penurunan kinerja keuangan daerah Kabupaten Seluma dan menunjukkan bahwa upaya penggalan serta pengelolaan sumber pendapatan daerah belum berjalan optimal. Sedangkan rata-rata hasil perhitungan pencapaian sasaran dan tujuan dari tahun 2020-2023 sebesar 62,45% (kurang efektif).

Indikator Target Pendapatan: Ini adalah jumlah target atau rencana pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk periode tertentu. Target ini mencerminkan ekspektasi atau perencanaan pendapatan berdasarkan potensi dan kebijakan yang ada, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 12 Hasil Perhitungan Total Belanja Daerah (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Total Belanja Daerah	Realisasi	Persentase (%)	Efektivitas Daerah	Keuangan
2020	1.024,54	918,59	89.66	Cukup Efektif	
2021	983,81	18,31	93.34	Efektif	
2022	948,67	926,19	97.63	Efektif	
2023	1.027,42	941,16	91.60	Efektif	
2024	1.137,70	1.078,46	94.79	Efektif	
<b>Total</b>	<b>5.122,14</b>	<b>3882,71</b>	<b>467,02</b>		
		<b>Rata-rata</b>	<b>93,40</b>	Efektif	

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat dijelaskan dibawah ini.

### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan

Dari hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer pemerintah Pusat dapat dilihat dari hasil ini:

**Tabel 13. Rasio Kemandirian Keuangan**

No	Uraian	Rata-Rata	Indikator	Hasil
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2024	71,99%	Total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lainnya yang sah.	Kurang Efektif
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	97,99%	Transfer dari pemerintah pusat (misalnya Dana Alokasi Umum atau DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber pendapatan lainnya yang bukan berasal dari PAD.	Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dari rasio kemandirian keuangan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2024 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 71,99% terbilang kurang efektif. Artinya pengelolaan PAD yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah belum stabil. Sedangkan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan hasil rata-rata sebesar 97,99% terbilang efektif. Hal ini terjadi pengelolaan transfer dari pemerintah pusat konsisten, sehingga daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan pendapatan agar tidak bergantung pada kondisi tertentu, misalnya situasi ekonomi nasional atau transfer pusat.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung (2022) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata-rata sebesar 74,17% dan rasio kemandirian tersebut konsisten berada diatas 60% disetiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah melalui PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tidak stabil, sementara pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan *tren* positif. Ke depan, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma perlu menyeimbangkan antara peningkatan PAD dan efisiensi penggunaan dana transfer pusat, agar dapat mencapai kemandirian keuangan yang berkelanjutan dan stabil.

### Analisis Rasio Efisiensi

Dari hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 tentang total belanja daerah dan pendapatan daerah, dapat dilihat dibawah ini: Berdasarkan perhitungan total belanja daerah pada biaya operasional merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma untuk menjalankan berbagai program, kegiatan atau operasional sehari-hari yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan tahun 2020 sampai dengan 2024 dari hasil pengukuran rata-rata 93,40% terbilang kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja operasional Pemerintah Kabupaten Seluma tergolong kurang efisien, karena realisasi anggaran belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini perlunya peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran, agar penggunaan dana dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Seluma kedepannya. Berdasarkan pendapatan daerah yang dihasilkan adalah total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Seluma dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti PAD, pendapatan dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya dengan rata-rata 96,61% terbilang kurang efisien.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma perlu meningkatkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, memperbaiki sistem administrasi pemungutan, serta memperkuat koordinasi antar instansi agar pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal dan efisien di masa mendatang. Berikut penjelasan tabel di bawah ini.

Tabel 14. Rasio Efisiensi

No	Uraian	Rata-Rata	Indikator	Hasil
1	Total Belanja Daerah) tahun 2020-2024	93,40%	Biaya operasional merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program, kegiatan atau operasional sehari-hari yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan	Kurang Efisien
2	Pendapatan Daerah tahun 2020-2024	96,61%	Pendapatan daerah yang dihasilkan adalah total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, seperti PAD, pendapatan dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya.	Kurang Efisien

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dari rata-rata perhitungan Total Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 93,40% terbilang kurang efisien. Sedangkan rata-rata pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 96,61 terbilang kurang efisien. Artinya selama tahun 2022–2024, pemerintah daerah belum mampu mengelola belanja operasional dengan baik. Pengeluaran daerah terlalu besar dibandingkan pendapatannya, sehingga efisiensi keuangan menurun. Ini menunjukkan perlunya pengendalian anggaran yang lebih ketat dan optimalisasi dari sumber pendapatan daerah agar keuangan daerah menjadi lebih sehat dan kuat.

### Analisis Rasio Efektivitas

Dari hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 tentang pencapaian sasaran dan tujuan dan total belanja daerah, dapat dilihat dibawah ini: Perhitungan pencapaian sasaran dan tujuan merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam periode tertentu, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata 62,45% terbilang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi peningkatan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak, optimalisasi potensi sumber pendapatan baru, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah untuk mencapai target yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Perhitungan total belanja daerah adalah jumlah target atau rencana pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seluma untuk periode tertentu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata 62,45% terbilang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah belum terlaksana secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran daerah melalui perencanaan yang lebih realistis, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan agar realisasi belanja dapat lebih optimal dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Berikut penjelasan tabel dibawah ini.

**Tabel 15. Rasio Efektivitas**

No	Uraian	Rata-Rata	Indikator	Hasil
1	Pencapaian Sasaran dan Tujuan	62,45 %	Pendapatan yang dihasilkan merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah.	Kurang efektif
2	Total Belanja Daerah	96,61 %	Target Pendapatan ini adalah jumlah target atau rencana pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk periode tertentu. Target ini mencerminkan ekspektasi atau perencanaan pendapatan berdasarkan potensi dan kebijakan yang ada	Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan rasio efektivitas hasil rata-rata perhitungan pencapaian sasaran dan tujuan PAD tahun 2020 dan 2024 sebesar 62,45% terbilang kurang efektif. Sedangkan hasil perhitungan total belanja daerah menunjukkan rata-rata sebesar 96,61% terbilang efektif. Hal menunjukkan bahwa upaya penggalian serta pengelolaan sumber pendapatan daerah belum berjalan optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Azwar (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun kabupaten/kota memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Artinya, secara umum (agregat) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbilang belum sepenuhnya mandiri dalam sumber dan pengalokasian anggaran daerah.

Berdasarkan hasil rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2024, kinerja pengelolaan pendapatan belum optimal. karena berhasil melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan tingkat efektivitas tinggi dan kemampuan fiskal yang lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma perlu memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedepannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan tabel dari rasio kemandirian keuangan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2024 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 71,99% terbilang kurang efektif. Artinya pengelolaan PAD yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak stabil. Sedangkan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan hasil rata-rata sebesar 97,99% terbilang efektif. Artinya, pengelolaan transfer dari pemerintah pusat konsisten, sehingga daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan pendapatan, agar tidak bergantung pada kondisi tertentu, misalnya situasi ekonomi nasional atau transfer pusat.
2. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dari rata-rata perhitungan Total Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 93,40% terbilang kurang efisien. Sedangkan rata-rata pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 96,61 terbilang kurang efisien. Artinya selama tahun 2022–2024, pemerintah daerah belum mampu mengelola belanja operasional dengan baik. Pengeluaran daerah terlalu besar dibandingkan pendapatannya, sehingga efisiensi keuangan menurun. Ini menunjukkan perlunya pengendalian anggaran yang lebih ketat dan optimalisasi dari sumber pendapatan daerah agar keuangan daerah menjadi lebih sehat dan kuat.

3. Berdasarkan rasio efektivitas hasil rata-rata perhitungan pencapaian sasaran dan tujuan PAD tahun 2020 dan 2024 sebesar 62,45% terbilang kurang efektif. Sedangkan hasil perhitungan total belanja daerah menunjukkan rata-rata sebesar 96,61% terbilang efektif. Hal menunjukkan bahwa upaya penggalan serta pengelolaan sumber pendapatan daerah belum berjalan optimal.

## Saran

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seluma perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD baru, memperkuat kinerja BUMD, serta mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.
2. Rasio Efisiensi Belanja Operasional diperlukan pengendalian belanja operasional, terutama pada pos belanja pegawai dan barang/jasa, dengan cara melakukan efisiensi anggaran serta mengalihkan sebagian dana ke belanja produktif seperti investasi daerah dan pembangunan infrastruktur.
3. Efektivitas PAD pada pemerintah daerah Kabupaten Seluma perlu memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan PAD, melakukan inovasi digital dalam pelayanan pajak daerah, serta menyesuaikan target PAD secara realistis agar efektivitas dapat meningkat kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, 2018. Peran “Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Azwar. 2023. “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021”. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207*
- Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung; Penerbit In Media.
- Faud. 2016. *Classical Management Theory To Modern Management Theory*.
- Halim & Haryanto. 2017. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro. 2018. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*. 5th ed. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- LM, I. S. 2021. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan, 2, 147-161*
- Melina Febi Awani dkk. 2021. “Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta. *Published by LPMP Imperium Journal homepage: <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI>*.
- Munawaroh. 2019. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah baik a good governanceo di bidang pmebinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Media Birokrasi, 1, 143-156*.
- R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung. 2022. “Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”. Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9, No. 2, Desember 2022: 96-111*.
- Sartika. 2019. “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti”. *Jurnal Inovasi Bisnis, 7, 147-153*.
- Siyoto & Sodik. 2018. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.

Sihombing. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit IN Media.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo. 2019 *Akuntansi Biaya dan Perencanaan dan Pengendalian*. Edisi Kesembilan Jilid 2. Jakarta : Erlangga.